

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Topik yang serupa dengan pembahasan ini sebelumnya sudah dikaji dari beberapa sudut pandang. Pada proses penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan beberapa bahan pustaka yang dianggap dapat membantu proses penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Berikut merupakan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari penelitian sebelumnya, yang dapat membantu saat proses penelitian dilakukan.

Dalam skripsi yang berjudul : *Penegakan Tindak Pidana Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Kabupaten Bangka*, Skripsi Universitas Bangka Belitung Balunjuk Penulis, Gloudya Mayolandha Fitsy. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan Teori Penegakan Hukum, hasil yang didapat Penegakan tindak pidana oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja. Upaya-upaya hukum yang dapat diambil oleh Penyidik Polisi Pamong Praja kepada pelanggardalam menegakan Peraturan Daerah adalah tindakan pembinaan atau Non Yustisi, dan tindakan Yustisi. Dalam penegakan

tindak pidana yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terdapat faktor-faktor penghambat yang mempersulit adanya suatu penegakan. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>5</sup>

Dalam skripsi yang berjudul : *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Tahun 2018*, Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Penulis, Ervin Zulpriansyah. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan Teori Organisasi Publik. Has Pembahasan, Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia diantaranya adalah fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL). Fenomena PKL kini seakan-akan menjadi masalah sosial ekonomi yang tumbuh berkembang sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi, pendapatan yang rendah dan faktor lainnya sebagainya menstimulasi pertumbuhan PKL pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kota Serang.<sup>6</sup>

Dalam skripsi yang berjudul : *Penegakan Perda Di Kabupaten Kudus ; Budaya Humanis Satpol Pp Dan Pedagang Kaki Lima (PKL)*, Jurnal Psikologi Kreatif Inovatif Vol 1 No 1, Penulis ; Iranita Hervi Mahardayani , Dhini Rama

---

<sup>5</sup> Fitsy, Gloudhy Mayolandha. 2018. "Penegakan Tindak Pidana Oleh Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP) Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Wilayah Hukum Kabupaten Bangka." *Skripsi Universitas Bangka Belitung*.

<sup>6</sup> Zulpriansyah, Ervin. 2018. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Tahun 2018." *Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa* 1.

Dhania. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan memakai teori Teori Konstruksionisme Sosial, Hasil Pembahasan Jurnal Tersebut, hasil dari pembahasan jurnal tersebut menyebutkan 77 % orang menyatakan citra Satpol PP Kudus cenderung baik. Data lain juga mengungkapkan bahwa, 60% menyatakan Satpol PP Kudus sudah melakukan penegakan perda secara humanis. Seluruh responden atau 100% menyatakan sikap mendukung terhadap gerakan perda secara humanis.<sup>7</sup>

Dalam Skripsi yang berjudul : Konstruksi Sosial Pedagang Kaki Lima Di Pelabuhan Kota Pare-Pare, *Journal Of Management*, Vol 4 No 3, Penulis ; Asmirah, Nirwana Sampara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan focus penilitianya pedagang di Pelabuhan Pare-Pare. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut menunjukan bahwasanya 1) Pedagang kaki lima memilih pelabuhan Parepare untuk mencari nafkah karena selalu ramai pengunjung sehingga ada kemungkinan memperoleh penghasilan lebih besar di banding ditempat lain; 2) Narasi hubungan sosial yang diharapkan mewujudkan tujuan ekonomi adalah kepantasan berperilaku, sopan berpenampilan, santun bertutur, jujur berdagang, mengedepankan keutuhan dan keselarasan, serta kerjasama menurut sistem bagi hasil; 3) Peraturan kerja yang mempertimbangkan kesetaraan gender supaya laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama berdagang di pelabuhan Parepare.

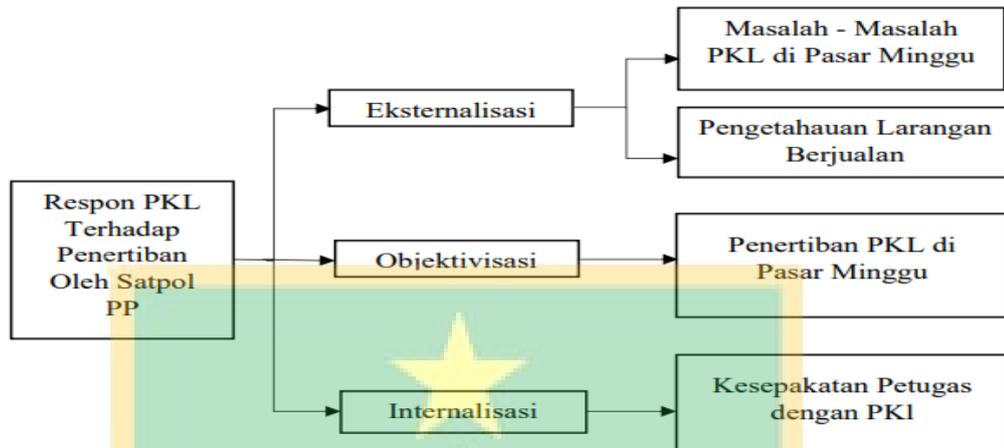
---

<sup>7</sup> Mahardayani, Iranita Hervi, and Dhini Rama Dhania. 2021. "Penegakan Perda Di Kabupaten Kudus : Budaya Humanis Satpol PP Dan Pedagang Kaki Lima ( PKL )." *Jurnal Psikologi Inovasi Kreatif* Vol 1 No 1, 41-45.

Dalam skripsi yang berjudul : Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Mataram, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No 2, Penulis ; Sataruddin, Suprianto, Akung Daeng. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengambil sampel dari tiga wilayah di kota Mataram yakni Cakranegara, Mataram, Rembige dengan 48 responden pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar atau 75 % pedagang kaki lima yang berjualan di kota Mataram membuka usahanya di atas trotoar dan badan jalan tempat pejalan kaki, yang menggunakan halaman dan emperan toko sebanyak 20 %, dan sisanya membuka usaha di halaman rumah. Sebagian besar produk yang dijual adalah makanan matang siap saji (42 %), makanan belum diproses (23 %) dan 35 % produk bukan makanan.

Pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan menghasilkan bahwasanya tindakan Satpol PP dalam menertibkan dan menegakan peraturan daerah mempunyai berbagai hasil yang dapat memperkuat penelitian ini serta bagaimana pedagang kaki lima masih banyak dijumpai memiliki alasan yang kuat, hal ini menjadi penelitian yang peneliti jalankan menjadi saling berkesinambungan. Penelitian yang peneliti memiliki perbedaan dimana peneliti ingin menganalisis bagaimana respon Pedagang kaki lima di Kawasan PD. Pasar Jaya Kelurahan Pasar Minggu terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan kajian sosiologis dengan Teori Konstruksi Sosial, yang mana penelitian yang peneliti lakukan mempunyai focus teori yang berbeda dengan focus dengan penelitian terdahulu.

## 2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

## 2.3 Kerangka Konsep dan Teori

### 2.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah yang berdasarkan hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun (2018)

### 2.3.2 Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja(SATPOL PP)

Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang diisi oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan pemerintah perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.<sup>9</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat, ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (Pasal 5 sampai dengan 7)

:

- 1.) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 2.) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3.) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4.) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

---

<sup>9</sup> Ibid

- 5.) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6.) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya.
- 7.) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>10</sup>

### 2.3.3 Pedagang Kaki Lima ( PKL )

Pedagang kaki lima adalah penaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, menjelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapatkan izin pemerintah daerah antara lain badan jalan,

---

<sup>10</sup> Ibid

trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan jembatan penyebrangan.<sup>11</sup>

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.<sup>12</sup>

Ciri-ciri pedagang kaki lima ( PKL ):

- Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- Tidak memiliki surat izin usaha.
- Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

### **2.3.4 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima ( PKL )**

Jenis dagangan pedagang kaki lima ( PKL) dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar Kawasan dimana pedagang kaki lima beraktivitas, Adapun jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima ( PKL ) secara umum :

---

<sup>11</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 11 Tahun 2015

<sup>12</sup> Saputra, Rholen Bayu.2014. "PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG BERJUALAN DI BADAN ." *JOM FISIP* 1-15.

1. Bahan Mentah dan setengah jadi seperti daging, buah, sayuran, dan sebagainya.
2. Makanan siap Konsumsi, terdiri dari bahan-bahan yang dapat langsung dikonsumsi, berupa makanan dan minuman
3. Barang-barang yang bukan makanan seperti pakaian, aksesoris, dan lainnya.
4. Jasa, seperti halnya tukang semir sepatu, sol sepatu, dan sebagainya.

### 2.3.5 Respon

Respon merupakan sebuah Tindakan atau sikap individu terhadap suatu peristiwa atau momen yang terjadi padanya. Dalam kamus Bahasa Indonesia Respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban, terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>13</sup> Kamus Filsafat dan Psikologi mengartikan, Respon adalah jawaban atas balasan yang terdiri dari aksi atau jawaban terhadap suatu reaksi dan aktivitas dari suatu otot atau kelenjar sebagai pengaruh dari kegiatan organisme atau keinginan untuk mengutarakan sesuatu dari suatu kejadian.<sup>14</sup>

Dalam buku Psikologi Komunikasi yang ditulis oleh Jalaludin Rakhmat, kegiatan dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu rangsangan dapat disebut sebagai respon. Respon dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat

---

<sup>13</sup> Depdikbud. (1996). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. H. 838

<sup>14</sup> Sudarsono. (1993). Kamus Filsafat dan Psikologi. Jakarta: Rineka Cipta. H. 225

dari pengamatan tentang subjek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan dan menafsirkan pesan-pesan.<sup>15</sup> Pada Dasarnya Respon merupakan hasil dari reaksi atau tanggapan individu maupun kelompok atas peristiwa, tindakan, pesan yang sedang terjadi, akan terjadi, dan sudah terjadi.

### 2.3.6 Faktor Terbentuknya Respon

Dalam buku Psikologi Komunikasi Respon dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :<sup>16</sup>

- Kognitif, respon yang timbul setelah adanya pemahaman terhadap sesuatu yang terkait dengan informasi atau pengetahuan. Terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui oleh individu atau kelompok.
- Afektif, respon yang timbul dikarenakan adanya perubahan perasaan terhadap sesuatu yang terkait dengan emosi, sikap, dan nilai. Timbul bila adanya perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci.
- Konatif, respon yang berupa tindakan, kegiatan atau kebiasaan yang terkait pada perilaku nyata. Merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.

---

<sup>15</sup> Rakhmat, Jalaludin. 1999. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya. H. 51

<sup>16</sup> Rakhmat, Jalaludin. 1999. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya. H. 218

## 2.4 Kerangka Teori

Teori konstruksi social yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjadi acuan untuk mengupas bagaimana konstruksi social itu dapat dibentuk. Kehidupan sehari-hari telah menyimpan dan menyediakan kenyataan, sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna-makna subjektif. Dimana individu menjadi penentu dalam dunia social yang dikonstruksi atau dibangun berdasarkan kehendak individu maupun kelompok. Individu berperan sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.<sup>17</sup>

Konstruksi social ialah suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Berger memahami suatu realitas social sebagai sesuatu yang kehadirannya tidak bergantung pada masing-masing individu. Dalam karyanya bersama Luckman, Berger memaparkan bahwa bagi analisis sosiolog hal yang terpenting adalah realitas kehidupan sehari-hari, yakni realitas yang dialami atau dihadapi oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari.

Berger menyebutkan ada tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio

---

<sup>17</sup> Berger, Peter L. dan Thomas L.1990, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Jakarta : LP3ES

kulturalnya sebagai produk manusia. Secara biologis dan social, manusia terus tumbuh dan berkembang, oleh karena itu, manusia terus belajar dan berkarya membangun kelangsungan hidupnya. Eksternalisasi merupakan proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Sudah merupakan suatu keharusan antropologis, manusia selalu mencurahkan diri ketempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat dimengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya.

Objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Kenyataan hidup sehari-hari itu objektivasi oleh manusia atau dipahami sebagai realitas objektif. Objektivasi merupakan pencapaian produk-produk aktivitas manusia yang dieksternalisasi kemudian memperoleh sifat objektif.

Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran dengan sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia social. Masyarakat sebagai kenyataan subjektif menyiratkan bahwa realitas objektif ditafsiri secara objektif dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Masyarakat sebagai kenyataan subjektif menyiratkan bahwa realitas objektif ditafsiri secara objektif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fithri Muta'afi, P. H. 2015. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Penderita Kusta. Paradigma. Volume 03 Nomer 03, Hal. 1-7